

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori *Stakeholder*

Teori ini muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori *stakeholder* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Menurut Budimanta, *et al.* dalam Lindawati dan Puspita (2015) terdapat dua bentuk dalam pendekatan *stakeholder* yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. Pendekatan *old-corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. Pendekatan *new-corporate relation* menitikberatkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya.

Menurut Deegan dalam Mulyono (2019) teori *stakeholder* diklasifikasikan dalam dua perspektif utama yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dalam perspektif normatif, semua pemangku kepentingan, terlepas dari kekuatan mereka yang mempengaruhi, harus diperlakukan sama dan perusahaan harus etis serta bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. Perspektif positif, manajer perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan pemangku kepentingan dan menghasilkan manajemen yang memberikan lebih banyak informasi sesuai dengan pengaruh kekuatan pemangku kepentingan. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk menjaga hubungan baik dan keterbukaan informasi kepada investor dan kreditor. Hubungan baik dan keterbukaan informasi

akan meningkatkan nilai *stakeholder* dan mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan tidak akan meminta pengembalian yang lebih (Yovina, 2018).

2.2. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri dalam Sianturi, 2016). GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban para *stakeholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam penerapan GCG terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar GCG dapat terlaksana dengan baik. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum ada lima prinsip dasar dalam KNKG menurut KNKG (2011), yakni: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.

4. *Independency* (Kemandirian)

Dalam hubungan dengan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.3. Sistem dan Mekanisme *Corporate Governance*

Secara umum terdapat dua struktur kepengurusan perusahaan yaitu *one tier board system* dan *two tier board system*. Pada perusahaan di Indonesia, umumnya menganut *two tier board system* yang dimana dari dewan komisaris serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengelolaan terpisah dari dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan. Menurut Sianturi (2016) terdapat 3 karakteristik utama *two tier board system*, yakni:

1. Struktur *two tier board system* memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan (dewan direksi) dengan dewan pengawas perusahaan (dewan komisaris).
2. Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat menghindari campur tangan dan ganda.
3. Dalam *two tier board system* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yaitu dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya.

2.2.4. Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah system pelaporan kepada pihak eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan (Bradbury dalam Dewi dan Pitriasari, 2019). Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 menyebutkan bahwa komite audit yang dimiliki perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari komisaris independen dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Aziz, 2014). Collier dalam Aziz (2014) menyatakan bahwa keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik.

2.2.5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Berdasarkan peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari anggota komisaris yang terdiri lebih dari 2 anggota. Menurut Collier dan Gregory dalam Awalia dkk, (2015) menyatakan semakin besar jumlah anggota dewan, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executive Office* (CEO) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif.

2.2.6. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No. 40 tahun 2007). Dewan direksi bertindak sebagai aspek sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, memiliki peran ganda yaitu sebagai *monitoring* dan pengambilan keputusan (Fama dan Jensen dalam Widiyanto, 2011). Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan

koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance* (Widianto, 2011).

2.3. *Sustainability Report*

Sustainability report menjadi salah satu hal yang menarik perhatian para stakeholder karena mampu menggambarkan kinerja perusahaan dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. *Sustainability report* menjadi bukti bahwa telah adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. *Sustainability* juga menjadi bukti salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara-nya maupun *stakeholder*-nya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan laporan berkelanjutan sebagai bentuk laporan yang diumumkan oleh emiten, perusahaan publik, atau lembaga jasa keuangan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, keuangan, lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik secara akuntabel. *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dalam Aziz (2014) mendefinisikan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) sebagai laporan yang mencakup kinerja lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kinerja ekonomi suatu organisasi.

Pengungkapan *sustainability report* merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mempublikasikan laporan berkelanjutan. Laporan ini memberikan informasi tentang pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. *Sustainability report* mempunyai standar pengungkapan yang mencerminkan keseluruhan aktivitas sosial perusahaan. Perusahaan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui *sustainability report* untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* (Aniktia dan Khafid, 2015).

2.4. Global Reporting Initiative (GRI)

GRI dibentuk oleh *Coalition for Environmentally Responsible Economics* (CERES) dengan dukungan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1997. GRI adalah sebuah organisasi non-profit yang mengembangkan berkelanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial. Visi dari GRI adalah sebuah ekonomi global yang berkelanjutan dimana organisasi mengelola kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, serta dampak dari tanggung jawab dan pelaporan transparan. Misi dari GRI adalah untuk membuat standar pelaporan berkelanjutan dengan memberikan pedoman dan dukungan kepada organisasi.

Sustainability Reporting Guidelines versi pertama diterbitkan pada bulan Juni 2000. Kemudian melakukan revisi terhadap panduan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu dan pada umumnya menggunakan penamaan atau pengkodean yang spesifik. GRI G2 atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diluncurkan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Pada tanggal 8 Juni 2017 *Global Reporting Initiative* meluncurkan GRI Standards di Indonesia. GRI memberikan panduan pelaporan organisasi menuju sebuah ekonomi global yang berkelanjutan. Sebuah ekonomi global yang berkelanjutan harus menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan keadilan sosial dan peduli lingkungan.

2.4.1. Global Reporting Initiative (GRI) G-4

GRI G-4 menerbitkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 1.500 perusahaan di 60 negara, dan secara *de-facto* telah menjadi standar dunia untuk pelaporan. Misi GRI G-4 adalah mengembangkan dan menyebarkan pedoman pelaporan keberlanjutan keseluruh dunia. Perusahaan dapat menggunakan pedoman ini secara sukarela untuk melaporkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dari semua kegiatan perusahaan, produk dan layanan perusahaan tersebut (Sahla dan Aliyah 2016).

Dampak yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, menurut GRI G-4 antara lain (Aliyah 2016):

a. Dampak Ekonomi

dampak ekonomi langsung didefinisikan sebagai perubahan potensi produktif dari kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah konsekuensi tambahan yang muncul sebagai akibat pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan para pemangku kepentingannya.

b. Dampak Lingkungan

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam 9 aspek, yaitu: (1) aspek bahan baku atau material; (2) aspek energi; (3) aspek air; (4) aspek keanekaragaman hayati; (5) aspek emisi; (6) aspek produk dan jasa; (7) aspek kepatuhan; (8) aspek transpor; dan (9) aspek lingkungan menyeluruh.

c. Dampak Sosial

GRI G-4 membagi dampak sosial kedalam 4 kategori, yakni hak asasi manusia (*human rights*) tenaga kerja (*labor*), masyarakat (*Society*), serta tanggung jawab produk (*product responsibility*).

2.5. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

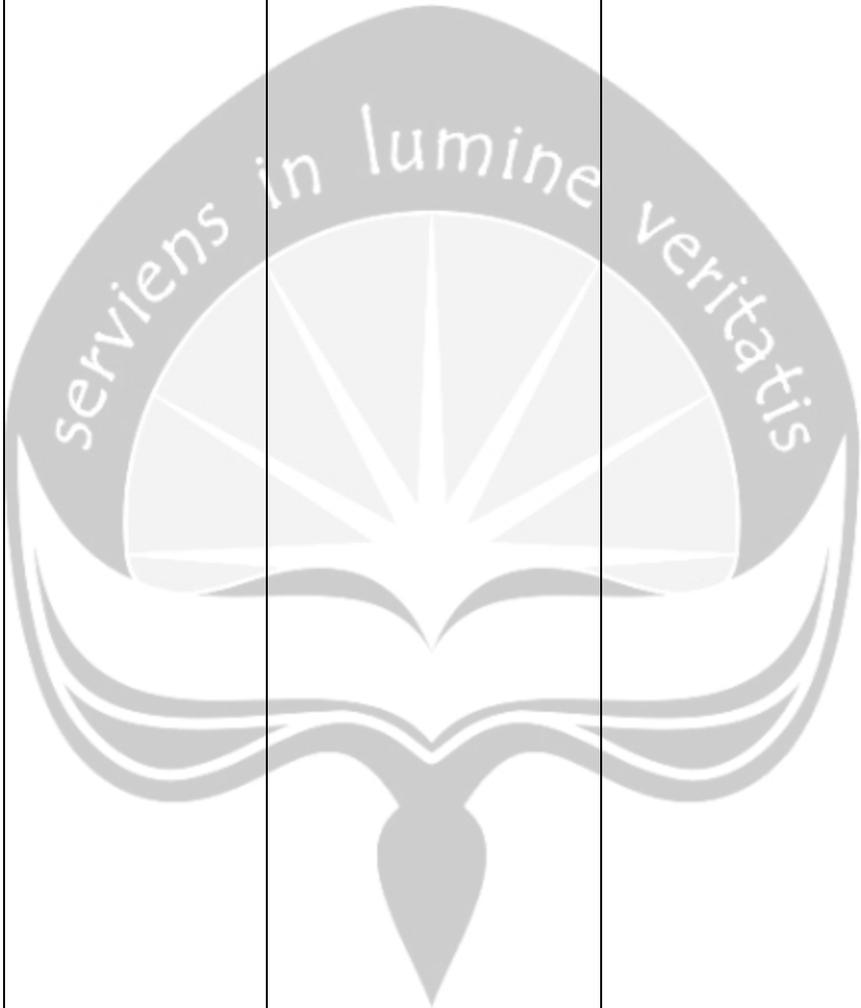
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Intan Pramesti Dewi dan Pipit Pitriasari (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan	• Variabel Independen: Komite Audit, Komisaris	• Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap

		<p><i>Sustainability Report</i> (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016)</p>	<p>Independen, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: <i>Sustainability Report</i> 	<p>pengungkapan laporan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan • Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan • Ukuran Perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan
--	--	--	--	---

2.	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Analisis Aktifitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, Governance Committe • Variabel Dependen: Pengungkapan Sustainability Report 	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report • Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report • Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report • Analisis Aktifitas tidak berpengaruh signifikan
----	---	--	---	--

				<p>terhadap pengungkapan sustainability report</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report • Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report • Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
--	--	--	--	--

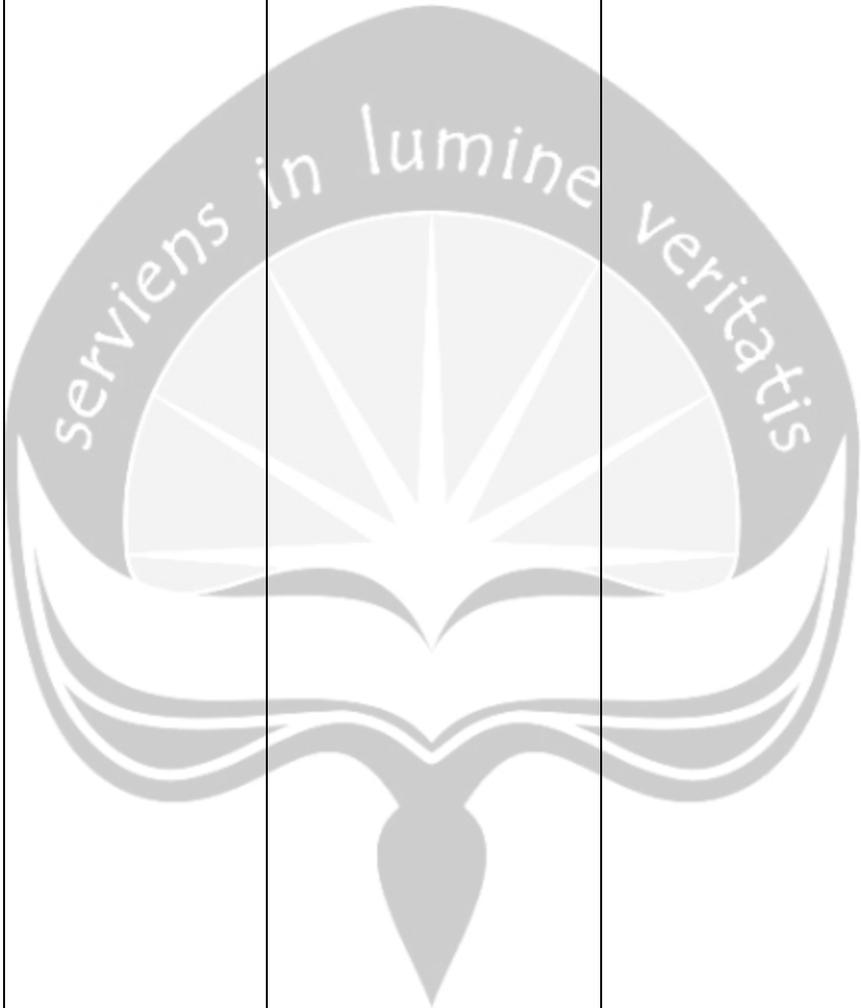


				<p>sustainability report</p> <ul style="list-style-type: none"> • Governance Committe berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report
3.	Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, <i>Governance Committe</i>, Profitabilitas, Lverage • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Kepemilikan manajerial tidak

				<p>berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Governance committee</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
4.	Mega Putri Yustia Sari dan Marsono (2013)	Pengaruh Keuangan, Perusahaan	Kinerja Ukuran dan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh negatif

		<p><i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i></p>	<p>Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 	<p>signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Aktivitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Ukuran Perusahaan tidak
--	--	---	--	---

				<p>berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
--	--	--	--	---



				<i>sustainability report</i>
5.	Abdul Aziz (2014)	Analisis pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 2011-2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi • Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Komisaris Independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Komite Audit tidak berpengaruh positif signifikan

			<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan 	<p>terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>
--	--	--	---	--

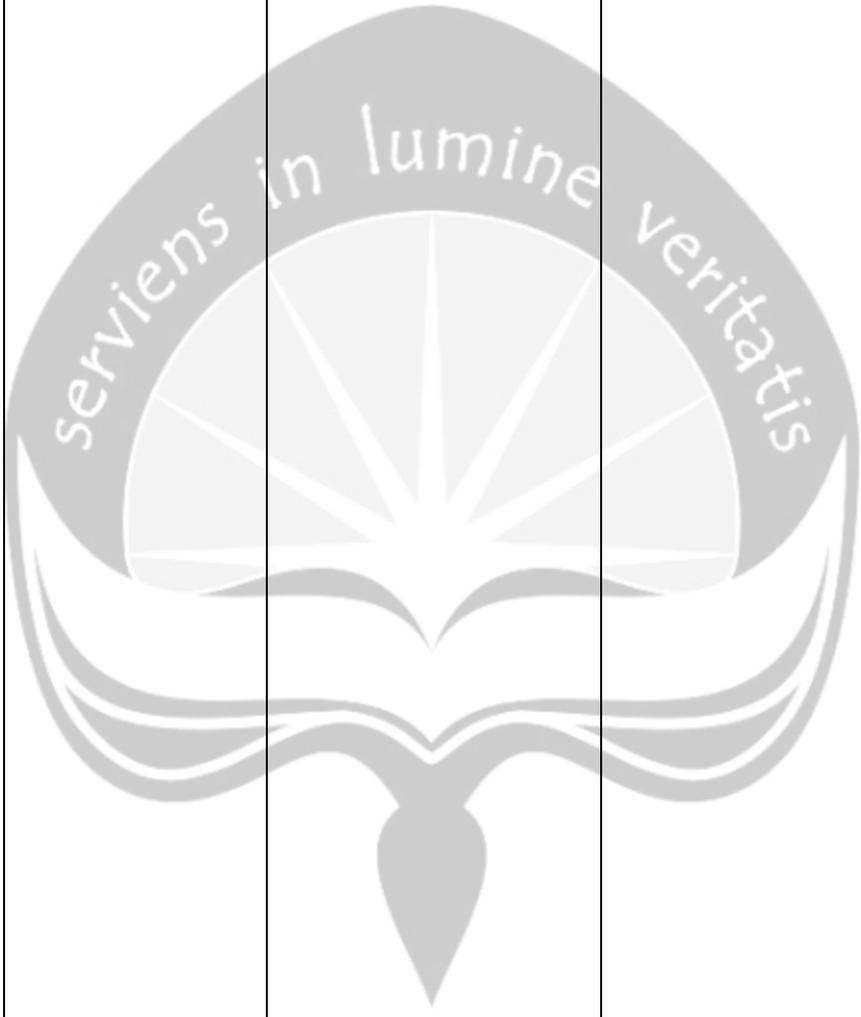
				<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Saham Terkonsentrasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>
6.	Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, dan A.Waluya Jati (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	• Variabel Independen: Dewan Komisaris,	• Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap

		pada Perusahaan di Indonesia	<p>Dewan Direksi, Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 	<p><i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> • Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i>
7.	Dwita Aliniar dan Sri Wahyuni (2017)	<p>Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Terdaftar di BEI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Komite Audit berpengaruh positif

			<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 	<p>signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> • Kepemilikan Saham Terkonsentrasi tidak berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>
--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>
8.	Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang <i>Listed</i> di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, <i>Governance Committee</i> • Variabel Dependen: Praktik Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan SR • Likuiditas tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan SR • Leverage tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan SR

		<p><i>Sustainability Report</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan SR • Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan SR • Komite audit berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan SR • Dewan direksi berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan SR • <i>Governance committee</i> tidak berpengaruh terhadap praktik
--	--	-------------------------------------	---



				pengungkapan SR
--	--	--	--	--------------------

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Ukuran Komite Audit dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 menyebutkan bahwa komite audit yang dimiliki perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari komisaris independen dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Aziz, 2014). Dewi dan Pitriasari (2019) menyatakan jumlah komite audit yang tinggi dengan frekuensi rapat yang semakin sering, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan semakin luas.

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan dengan tujuan agar koordinasi komite audit semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap laporan dan pelaksanaan *corporate governance* agar menjadi semakin baik. Dengan

semakin sering mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit semakin baik sehingga dapat melakukan terhadap manajemen dengan lebih efektif (Widiyanto, 2011). Sari dan Marsono (2013) menyebutkan semakin sering komite audit melakukan pertemuan dan saling berkomunikasi, maka beberapa temuan audit akan dievaluasi dan dilaporkan kepada manajer, sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik. Selain menerbitkan laporan keuangan yang berintegritas, pihak manajemen mengungkapkan informasi dalam laporan tambahan, yaitu pengungkapan *sustainability report*. Melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* (Suryono dan Prastiwi 2011). Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H1 = Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report

2.6.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Pengungkapan Sustainability Report

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Menurut Haniffa dan Cooke (2002) dalam Sari dan Marsono (2013) menyatakan apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan

power kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Peningkatan kualitas pengungkapan dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara mengungkapkan laporan tambahan seperti *sustainability report*. Coller dan Gregory dalam Awalia dkk (2015) menyatakan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executive Office* (CEO). Dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris, menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H2 = Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report

2.6.3. Dewan Direksi dengan Pengungkapan Sustainability Report

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No. 40 tahun 2007). Suryono dan Prastiwi (2011) dalam Sari dan Marsono (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance*. Semakin tinggi indeks *corporate governance* yang menetapkan GCG semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H3 = Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report

2.7. Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Variabel Dependen

